

TESIS

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGUNAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Disusun Oleh:

NAMA : MAWARDI
NPM : 1762001062
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2020

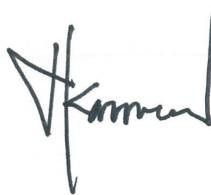
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Mawardi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1762001062
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul : Efektivitas Program Penggunaan
Transaksi Non Tunai dalam
Pembayaran Belanja Penanggulangan
Bencana oleh Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 21 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. R. Luki Karunia, MA



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Mawardi
NPM : 1762001062
Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara /
Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Efektivitas Program Penggunaan
Transaksi Non Tunai dalam
Pembayaran Belanja
Penanggulangan Bencana oleh
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Telah mempertahankan Tesis ini dihadapan Tim Penguji
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta

Hari : Senin
Tanggal : 21 Desember 2020
Pukul : 08.00 s.d 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

Tim penguji :
Ketua : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si, Ph.D
Pembimbing/Anggota : Dr. R. Luki Karunia, MA
Anggota : Dr. Asropi, M.Si



Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the committee members]

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mawardi
NPM : 1762001062
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara/
Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non
Tunai dalam Pembayaran Belanja
Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **“Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN JAKARTA.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 21 Desember 2020

Penulis



Mawardi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya kepada penulis serta salam kita untuk junjungan Rasul Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P) dalam bidang program studi Administrasi Pembangunan Negara dengan konsentrasi Manajemen Pembangunan Daerah.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bpk. Dr. R. Luki Karunia, MA., selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya dalam penelitian tesis ini dan memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya. Pada kesempatan ini pula peneliti juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos., MA., selaku ketua di POLITEKNIK STIA LAN Jakarta.
2. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Kampus POLITEKNIK STIA LAN Jakarta,

3. Orangtua (alm) Bapak dan (alm) Ibu dan (alm) Bapak dan Ibu Mertua juga Abang-abang dan Kakak-kakak ku terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat serta doa tiada henti;
4. Istri Tercinta dr. Yanda Nur Estuningputri dan Anak-anakku Tercinta (Ibni Hassan M, Ibni Hussein M dan Muhammad Khalil Zayan M.) terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat serta doa tiada henti;
5. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku Kuliah yang bersama-sama berjuang untuk masa depan kita, terima kasih atas kerjasama dan bantuan kalian;
6. Serta pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat membantu sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 21 Desember 2020

Mawardi

ABSTRAK

MAWARDI, 1762001062

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGGUNAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

133 Halaman, 5 Bab, 9 Tabel, 19 Gambar, 9 Lampiran

Daftar Pustaka : 18 Buku, 14 Jurnal, 6 Peraturan

Penanggulangan bencana merupakan suatu hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan harus selalu menjadi prioritas dikarenakan berhubungan dengan nyawa seseorang maka pemerintah seharusnya terus melakukan perbaikan dalam pelayanan penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana. Transaksi non tunai pada pemerintah daerah ini menggunakan *Cash Management System (CMS)*. *Cash Management System (CMS)* adalah fitur fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara realtime dan online untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan.

Metode penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan pada 6 (enam) orang *key informant*, telaah dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Efektivitasnya masih rendah, dikarenakan Penyelenggaraan Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari aspek Ketepatan Sasaran Program, aspek Sosialisasi Program, aspek Tujuan Program dan aspek Pemantauan Program.

Disarankan kepada BPKD Provinsi DKI Jakarta membuat *guidance*/panduan yang jelas tentang Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Penanggulangan Bencana sehingga dapat mempercepat transaksi karena urgensi yang tinggi terkait nyawa manusia, BPKD Provinsi DKI Jakarta harus berinovasi dan lebih interaktif dalam menyebarkan sosialisasi kepada pengguna

transaksi non tunai, seperti membuat animasi dan *tools* simulasi transaksi non tunai sehingga bendahara lebih mudah memahaminya, meningkatkan kesadaran kepada bendahara BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penggunaan transaksi non tunai harus mengarahkan kepada skala prioritas dalam memproses transaksi pembayarannya, dilakukan evaluasi dan monitoring 3 bulan sekali dari BPKD Provinsi DKI Jakarta guna meminimalisir indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah, belum ada penelitian terkait regulasi yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program penggunaan transaksi non tunai di Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : efektivitas, transaksi non tunai, penanggulangan bencana



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRACT

MAWARDI, 1762001062

PROGRAM EFFECTIVENESS OF USING NON-CASH TRANSACTIONS IN THE PAYMENT OF DISASTER MANAGEMENT EXPENDITURE BY THE DKI JAKARTA PROVINCE REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY

133 Pages, 5 Chapters, 9 Tables, 19 Pictures, 9 Appendices

Bibliography: 18 Books, 14 Journals, 6 Regulations

Disaster management is something that has a high level of urgency and must always be a priority because it is related to a person's life, the government should continue to make improvements in disaster management services. This research was conducted to determine the effectiveness of the Program for the Use of Non-Cash Transactions in the Payment of Disaster Management Expenditures by the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province by taking into account the aspects contained in the Effectiveness of the Program for Using Non-Cash Transactions in Payments for Disaster Management Expenditures. This non-cash transaction at local governments uses a Cash Management System (CMS). Cash Management System (CMS) is a feature of internet-based banking service facilities aimed at corporate customers (non-personal) in conducting real-time and online financial transactions to facilitate public entities to transact and carry out supervision.

The research method used is the case study method with data collection techniques with the interview method and document review. Interviews were conducted with 6 (six) key informants, document review was focused on documents related to research on the Program for the Use of Non-Cash Transactions in Disaster Management Expenditure Payments.

The results showed that the effectiveness of the Program for Using Non-Cash Transactions in the Payment of Disaster Management Expenditures by the DKI Jakarta Provincial Financial Management Agency was still low, due to the implementation of the Program for the Use of Non-Cash Transactions in Disaster Management implemented by the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province in terms of aspects Accuracy of program targets, aspects of program socialization, aspects of program objectives and aspects of program monitoring.

It is recommended that the DKI Jakarta Provincial BPKD make clear guidance on the Use of Non-Cash Transactions in Disaster Management so that it can speed up transactions because of the high urgency related to human life, the DKI Jakarta Provincial BPKD must innovate and be more interactive in disseminating socialization to non-cash transaction users, such as creating animations and non-cash transaction simulation tools so that the treasurer can understand it more easily, increasing awareness to the treasurers of the DKI

Jakarta Provincial BPBD in the use of non-cash transactions must direct to a priority scale in processing payment transactions, evaluation and monitoring are carried out every 3 months from the BPKD DKI Jakarta Province In order to minimize the indication of overpayment which has an impact on regional loss indications, there is no research related to regulations governing supervision and control over the implementation of programs for the use of non-cash transactions in DKI Jakarta.

Keywords: effectiveness, non-cash transactions, disaster management



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
 BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	16
1. Tinjauan Teori.....	16
a. Manajemen Pembangunan Daerah.....	16
b. Manajemen Bencana.....	23
c. Transaksi Non Tunai.....	28
d. Efektivitas Transaksi Non Tunai.....	29
e. Konsep Kunci.....	45

	B. Model Berpikir	48
	C. Pertanyaan Penelitian	49
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	51
	B. Teknik Pengumpulan Data	51
	C. Pengolahan Data dan Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum BPKD Prov. DKI Jakarta	60
	B. Penyajian Data dan Pembahasan	71
	1. Aspek Ketepatan Sasaran Program.....	72
	2. Aspek Sosialisasi Program.....	86
	3. Aspek Tujuan Program.....	104
	4. Aspek Pemantauan Program.....	116
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	130
	LAMPIRAN	
	1. Matriks Penelitian	
	2. Pedoman Wawancara	
	3. Pedoman Telaah Dokumen	
	4. Surat Penelitian Tesis Mahasiswa STIA-LAN	
	6. Surat Ijin dari Lokasi Penelitian	

7. Transkrip Wawancara

1. *Key Informant 1*

2. *Key Informant 2*

3. *Key Informant 3*

4. *Key Informant 4*

5. *Key Informant 5*

6. *Key Informant 6*

8. Hasil Telaah Dokumen

9. Daftar Riwayat Hidup



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Hasil Pemeriksaan LHP atas LKPD Provinsi DKI Jakarta.....	3
Tabel 2	Nilai Tambah Inovasi Transaksi Non Tunai.....	9
Tabel 3	Tahapan-tahapan Bantuan Bencana.....	23
Tabel 4	<i>Key Informant</i> Penelitian.....	54
Tabel 5	Jumlah Pegawai Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta	65
Tabel 6	Data Realisasi Anggaran Program Penggunaan Transaksi Non Tunai.....	73
Tabel 7	Peralatan dan Mesin yang merupakan Belanja Modal UPDI dan Belanja PPKD Per 31 Desember TA 2019	75
Tabel 8	Jumlah Informasi Sosialisasi Penggunaan Transaksi Non Tunai Edukasi Transaksi Non Tunai dan Kegiatan Penggunaan Transaksi Non Tunai PKD Provinsi DKI Jakarta	92
Tabel 9	Laporan Tahun 2018 – 2019 Serah Terima Barang dari Pengurus Barang BPKD Provinsi DKI Jakarta	93

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Tren Realisasi Belanja Tahun 2014 s.d 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1
2.	Dampak Peneraan Inovasi Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi belanja 2014 s.d 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	9
3.	Diagram Siklus Penanggulangan Bencana	25
4.	Model Berfikir	48
5.	Bagan susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	62
6.	Contoh Penerapan Mekanisme Non Tunai BPKD Provinsi DKI Jakarta	70
7.	Sistem E-BKU untuk Mencatat Transaksi Secara Real Time	80
8.	Tampilan e-BKU dalam SIPKD	88
9.	Poster SP2D Online	94
10.	Foto Launching MPN GEN 3	95
11.	Launching MPN G3	95
12.	Pameran Sosialisasi Penggunaan Transaksi Non Tunai	97

13.	Data Penggunaan Transaksi Non Tunai BPBD Provinsi DKI Jakarta	98
14.	Perkembangan Implementasi CMS Bank DKI	106
15.	Alur Proses BKU Pengeluaran-SKPD	110
16.	Dampak penerapan transaksi non tunai terhadap efisiensi belanja	111
17.	Penggunaan CMS Bank DKI di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	112
18.	Dashboar SIPKD dari E-BKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	118
19.	E-BKU Form 50 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	122

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

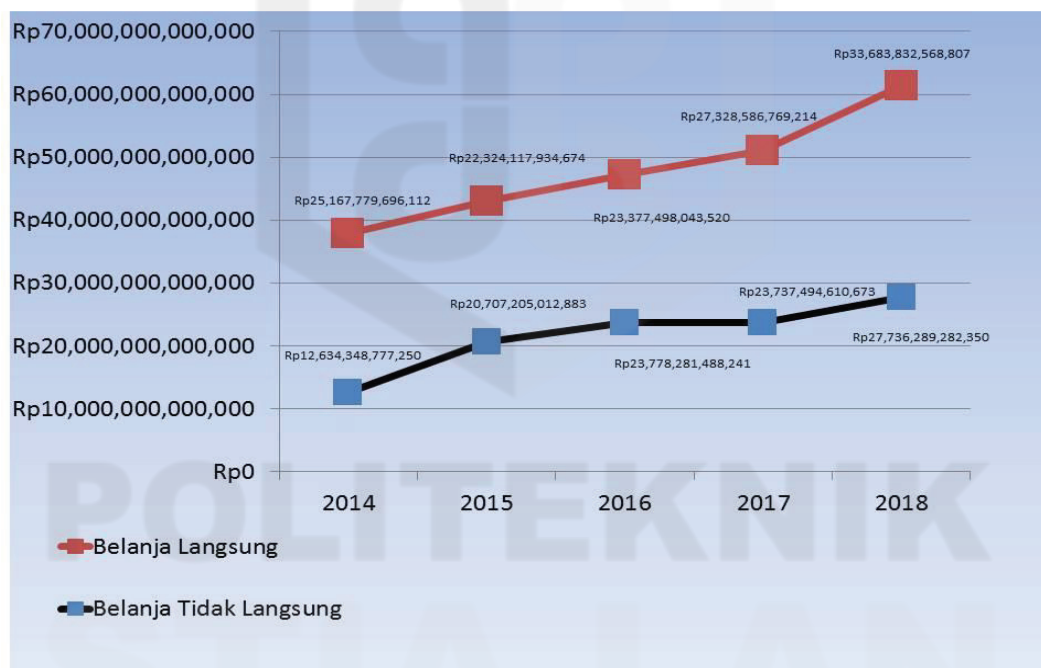
A. Latar Belakang Permasalahan

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang dibidang Keuangan Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dimana Pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanannya kepada publik.

Posisi wilayah strategis menjadikan Jakarta sebagai pusat penggerak roda perekonomian dan perkembangan teknologi, globalisasi serta era demokratisasi dan menjadikan masyarakatnya semakin cerdas menuntut adanya keterbukaan informasi atas pengelolaan keuangan daerah. Atas kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menjadi sorotan masyarakat nasional atas indikasi adanya berbagai praktik korupsi atas penyelewengan keuangan pemerintah daerah. Indikasi atas kerugian daerah tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen pembayaran yang dipakai dalam melakukan

pembayaran atas Belanja Daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1
Tren Realisasi Belanja Tahun 2014 s.d 2018
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai, seluruh kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan cara-cara pembiayaan atas kegiatan tersebut tertuang dalam APBD. Menurut Yuwono (2007, p. 85) Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan

berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja juga dirinci menurut urusan pemerintahan pemerintah daerah, organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek belanja. Dari grafik tren realisasi belanja tahun 2014 s.d 2018 dapat diketahui bahwa realisasi belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun sangatlah besar nilainya.

Hasil evaluasi audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta merupakan cara dalam mengukur akuntabilitas keuangan suatu Pemerintahan dan dapat dikatakan evaluasi audit atas LKPD DKI masih kurang baik. Dapat diketahui dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 opini BPK atas tata kelola keuangan daerah menghasilkan jawaban Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu perbaikan dalam sistem pengendalian internal atas tata kelola keuangan daerahnya dan yang sesuai dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Tabel 1 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta

LAPORAN BPK	TAHUN		
	2014	2015	2016
LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN	38 TEMUAN	15 TEMUAN	13 TEMUAN
LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	32 TEMUAN	35 TEMUAN	33 TEMUAN

*Sumber : LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi DKI Jakarta
(diolah peneliti, 2020)*

Dari hasil Pemeriksaan BPK tersebut Di Tahun 2014 BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 38 temuan senilai Rp.2.162.430.175.391,- dan di tahun 2015 sebanyak 15 temuan senilai Rp.374.688.685.066,- yang terdiri dari indikasi kerugian daerah dan potensi kerugian daerah. Serta temuan atas sistem pengendalian internal DKI di tahun 2014 sebanyak 32 temuan dan di tahun 2015 sebanyak 35 temuan hal tersebut merupakan temuan BPK atas pokok pokok kelemahan pengendalian internal di Pemprov DKI. Temuan atas kelemahan pengendalian internal di Pemprov DKI dinyatakan sebagai lemahnya kendali yang dilakukan oleh pengelola keuangan di DKI seperti diantaranya masih dijumpai indikasi kelebihan pembayaran yang

berdampak pada indikasi kerugian daerah, hasil pengadaan belanja barang tidak digunakan, serta catatan belanja daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban secara lengkap yang kesemuanya terlihat dari penilaian dari BPK terhadap LKPD DKI Jakarta.

Menurut Tuanakotta (2007) Tindakan kegiatan ilegal ataupun tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah digambarkan melalui pohon kerugian Negara yang terdiri dari 4 (empat) cabang yang menjelaskan 4 (empat) akun dalam laporan keuangan yaitu aset, kewajiban, penerimaan dan pengeluaran. Dan kegiatan yang terkait dengan transaksi tunai dijelaskan pada kerugian negara dengan pengeluaran dimana dalam aktivitas seperti yang mungkin dilakukan oleh para birokrat seperti Kepala Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Bendahara Pengeluaran yang memungkinkan menggunakan transaksi tunai untuk melakukan penyelewengan atas penyelenggaraan dana APBD misalnya, seorang bendahara melakukan pertanggung jawaban fiktif atas suatu kegiatan fiktif dimana kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang diprogramkan tapi kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, kemudian adanya pelaksanaan pembayaran secara tunai langsung kepada pihak ketiga yang memungkinkan adanya kecurangan dimana dilakukannya pembayaran yang diberikan kepada pihak ketiga tapi mungkin pekerjaannya belum selesai ataupun pengadministrasiannya belum baik.

Transaksi pembayaran yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah umumnya adalah transaksi keuangan tunai. Definisi dari transaksi keuangan tunai yaitu transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam Jurnal "Persyaratan dan Implikasi Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia", sebagaimana yang ditulis oleh RG Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking* dijelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang. Transaksi dengan penggunaan uang tunai memungkinkan pemanfaatannya untuk kegiatan ilegal ataupun tindakan korupsi, karena transaksi tunai dari tahun ke tahun menimbulkan dugaan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi tunai dicurigai untuk menghindari terlacaknya kegiatan penyimpangan yang dilakukan.

Berdasarkan atas audit LKPD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 BPK melakukan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI dan PT Bank DKI selaku mitra Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyimpanan Rekening Umum Kas Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dengan melakukan nota kesepakatan tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara *online* pada PT Bank DKI dan selain itu adanya penandatanganan nota

kesepahaman dan deklarasi gerakan GNNT “Gerakan Nasional Non Tunai” yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI juga melatarbelakangi wujud Pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari penerapan GNNT pada tanggal 14 Agustus 2014, dibuat MOU (kerjasama) antara Bank BI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana tujuan dari MOU tersebut yaitu untuk mendukung dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan keuangan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

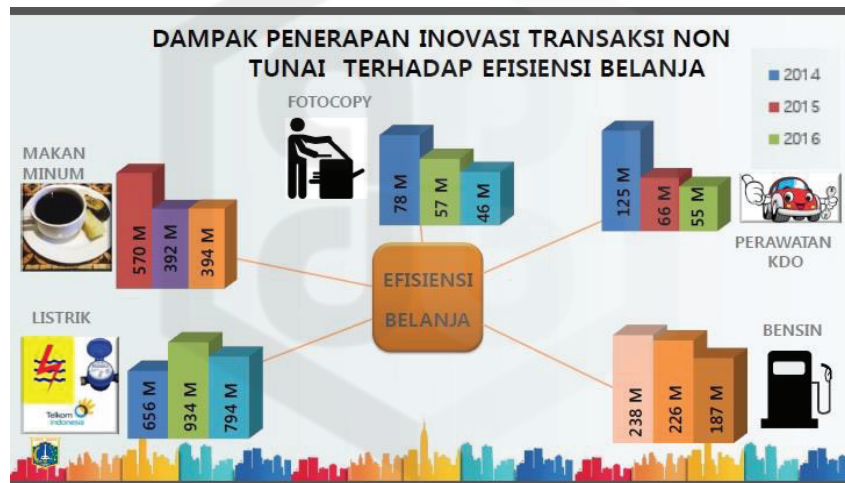
Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diimplementasikan oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2016 tentang pelaksanaan transaksi non tunai (transaksi *non-cash*) oleh Bapak Basuki Tjahaya Purnama (Pak Ahok) dimana di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi melakukan transaksi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD melainkan hanya pelaksanaan transaksi non tunai semua kegiatan berkaitan dengan APBD di Pemprov DKI Jakarta diterapkan melalui layanan *Cash Management System* (CMS) dari PT Bank DKI untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah

daerah termasuk transaksi terhadap pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi.

Atas Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2016 tersebut jajaran birokrasi di pemerintah DKI Jakarta diamanatkan untuk tidak lagi melakukan transaksi tunai yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah) selain dengan cara transaksi non tunai atau melalui *online* sistem menggunakan layanan *Cash Management System* (CMS). Instruksi tersebut merupakan perubahan atas berbagai Instruksi awal Gubernur mulai di tahun 2014, yaitu Instruksi Gubernur No. 4 Tahun 2014 dimana Pemerintah membatasi transaksi tunai dengan batasan transaksi maksimum sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan di tahun yang sama revisi atas Instruksi Gubernur tersebut dikeluarkan tanggal 20 November 2014 melalui Ingub No. 151 Tahun 2014 dengan membatasi transaksi penarikan tunai menjadi Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Pada Tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menurunkan batasan transaksi tunai menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pada kenyataanya bendahara atas tekanan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab masih dapat membayarkan secara tunai dan masih dapat menyimpan uang dibrankas bendahara.

Gambar 2

**Dampak Peneraan Inovasi Transaksi Non Tunai
Terhadap Efisiensi belanja 2014 s.d 2016
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**



Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dampak penerapan inovasi transaksi non tunai terhadap efisiensi belanja terlihat secara signifikan efisiensinya terlihat dari tabel Belanja mulai dari Belanja Makan minum, belanja listrik, belanja bensin dan belanja perawatan kendaraan operasional (KDO) dan belanja Fotocopy dari 46 milyar di tahun 2014 efisiensinya menjadi 78 milyar.

Tabel 2

**Nilai Tambah Inovasi
Transaksi Non Tunai**

NILAI TAMBAH INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI							
							
BEFORE	Belanja makan minum melekat di kegiatan, terjadi manipulasi petanggungjawaban belanja	Belanja ATK melekat di kegiatan, terjadi manipulasi petanggungjawaban belanja	Terjadinya pemutusan listrik oleh PLN atas SKPD yang tidak tersedia anggarannya	Pengadaan outsourcing melalui pihak ketiga sehingga pekerjaan dan pembayaran tidak terkontrol	Belanja BBM melalui kupon sehingga dapat digunakan untuk mengisi kendaraan secara tidak sah	Belanja Foto Copy di masing-masing SKPD dengan mekanisme pengadaan langsung, mahal dan tidak berkualitas	Perawatan di bengkel yang ditunjuk SKPD melalui penunjukan langsung, mahal dan tidak berkualitas
AFTER	Sentralisasi belanja makan minum di sekretariat, tidak ada manipulasi pertanggungjawaban	Sentralisasi Belanja ATK, Lelang konsolidasi, tidak ada manipulasi pertanggungjawaban	Pembayaran listrik di talang oleh Bank DKI dengan skema kartu kredit sehingga tidak terjadi pemutusan listrik	Pengadaan melalui kontrak perorangan, diawasi secara ketat, dan pembayaran langsung ke rekening pegawai	Belanja BBM melalui RFID sehingga hanya kendaraan yang sah sesuai RFID yang dapat diisi BBM	Sewa melalui Lelang konsolidasi, sehingga lebih murah dan berkualitas	Perawatan melalui bengkel ATPM sehingga lebih terjamin kualitas maupun harga

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tabel 2 Nilai Tambah Inovasi Transaksi Non Tunai berbagai kelebihan dari Transaksi Non Tunai yang semula belum menggunakan Transaksi Non Tunai Belanja Makan Minum melekat di kegiatan, terjadi manipulasi pertanggungjawaban belanja setelah menggunakan Transaksi Non Tunai, sehingga belanja makan minum, sentralisasi belanja makan minum di sekretariat, sehingga tidak ada manipulasi pertanggungjawaban.

Apakah Efektivitas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash), mampu menciptakan *good governance* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta, beberapa hal yang diharapkan pelaksanaan transaksi non tunai dalam Penanggulangan Bencana Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah dikelola antara lain:

1. Membangun budaya masyarakat dan dunia usaha terutama yang terkena dampak transaksi dengan Penanggulangan Bencana

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transaksi non tunai.

2. Mencegah terjadinya manipulasi atau *markup* belanja daerah dalam penanggulangan bencana oleh sektor swasta dan pemerintah.
3. Membangun kedisiplinan dan kejujuran dunia usaha dalam rangka mencegah praktek kolusi dan korupsi di sektor belanja pemerintah dalam penanggulangan bencana.
4. Membangun dan memberdayakan dunia usaha sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam penanggulangan bencana.
5. Membangun budaya masyarakat untuk belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dalam penanggulangan bencana.

Namun demikian, efektifitas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) dalam Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta masih ada kelemahannya, seperti:

1. Masih lemahnya sistem pengendalian internal dalam tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pengelolaan belanja daerah belum memadai.
2. Masih dijumpai indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah.
3. Hasil pengadaan belanja barang tidak digunakan, serta catatan belanja daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban secara

lengkap yang kesemuanya terlihat dari penilaian dari BPK terhadap LKPD DKI Jakarta.

4. Adanya tuntutan atas Reformasi Keuangan Negara serta adanya MOU GNNT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Indonesia serta terbitnya Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan transaksi non tunai. Dalam mengatasinya tata kelola keuangan daerah yang baik sangatlah dibutuhkan di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Penggunaan transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014). Implementasi transaksi non cash sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik *money laundry* (Moshi, 2012). Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non-tunai (Lukmanulhakim dkk, 2016). Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2019). Penelitian terhadap transaksi non-tunai sudah mulai banyak berkembang. Utari (2016), menemukan hasil secara empiris bahwa dengan penerapan transaksi non-tunai pemerintah daerah DKI-Jakarta dapat mencapai

akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Berdasarkan penelitian empiris transaksi-non-tunai juga mampu mengurangi adanya praktik kecurangan pada organisasi (Sobko, 2014). Pada temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh transaksi non-tunai (Nelasari & Cahyono, 2018). Berdasarkan kesenjangan menurut saran dari hasil penelitian terdahulu (Utari, 2016) yaitu; perbaikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta perlunya pembenahan atas integrasi dan keakuratan sistem yang telah ada juga perlu menjadi prioritas yang utama, karena di setiap aspek pengelolaan keuangan pemerintahan perlu adanya keserentakan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparansi dan berlandaskan hukum untuk menuju pemerintah yang *good governance* dapat tercapai, menurut data menunjukkan total penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.177.124 jiwa, dengan jumlah rata-rata urbanisasi sepanjang tahun 2014 sebanyak 123.178 jiwa setiap tahunnya (Jakarta Open Data, 2016). Hal tersebut membuat kepadatan penduduk DKI Jakarta melebihi batas normalnya yakni melebihi angka 15.000 jiwa tiap km² (Abraham, Lubis, Indrawan, & Fachrudin, 2014). Kepadatan penduduk dapat dijadikan referensi dalam menentukan kerentanan dan dapat meningkatkan potensi ancaman bencana Twigg dalam (Muslim, Firdaus, Kumalawati, & Aristin, 2017).

Penanggulangan bencana merupakan suatu hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan harus selalu menjadi prioritas dalam

pelayanannya. Penanggulangan bencana yang meliputi pelayanan terhadap keadaan darurat yang bisa saja secara tiba-tiba terjadi pada masyarakat kapan saja dan dimana saja seperti kebakaran, banjir, kecelakaan dan dikarenakan berhubungan dengan nyawa seseorang maka pemerintah seharusnya terus melakukan perbaikan dalam pelayanan penanggulangan bencana. sehingga penelitian ini untuk menganalisis Efektivitas Penggunaan Transaksi Non Tunai pada Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta ?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

a. Manfaat terhadap Kepentingan Dunia Akademik

Dengan mengetahui Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu Manajemen Pembangunan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Belanja dalam Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.

b. Manfaat terhadap Dunia Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan efektivitas Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana agar menjadi lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan mengacu aspek-aspek, Efektivitas Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta Efektivitasnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi arah penelitian. Aspek-aspek tersebut mencakup sebagaimana berikut:

1. Aspek Ketepatan Sasaran Program

Penyelenggaraan Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta apabila ditinjau dari sub aspek **Ketepatan Penghitungan Biaya**, dapat dikatakan sudah tepat, karena sudah sesuai dengan kebutuhan sasaran program, ketepatan alokasi penganggaran dalam artian tidak kekurangan ataupun kelebihan dalam menganggarkannya sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan system SIPKD yang terintegrasi semua pelayanan pembayaran dari hulu sampe hilir. mulai dari proses perencanaan kemudian proses penatausahaan dan proses transaksi dan pada akhirnya adalah proses pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan ditinjau dari sub aspek **Ketepatan**

Penentuan waktu terhadap Program pada penggunaan transaksi non tunai secara umum efektif dikarenakan dari segi waktu menggunakan system SIPKD dikerjakan secara system lebih cepat dibandingkan manual dan dapat dipertanggungjawabkan secara *real time* per transaksinya.

2. Aspek Sosialisasi Program

secara umum aspek sosialisasi program dikatakan cukup baik pada sub **aspek ketepatan dalam pengukuran** mendukung Program Penggunaan Transaksi Non Tunai dirasakan sosialisasi sudah cukup memadai dan mendukung dikarenakan seluruh bendahara SKPD diwajibkan mengikuti diklat dan bimtek yang diwajibkan seluruh bendahara termasuk bendahara PBD Provinsi DKI Jakarta, sedangkan sub aspek **Ketepatan dalam menentukan pilihan** dilihat hasil penelitian masih kurang sosialisasinya pada penggunaan transaksi non tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan akan tetapi masih kurang, karena belum merata sosialisasinya penggunaan transaksi non tunai dalam ke seluruh SKPD sehingga ada beberapa yang belum memahami dengan benar.

3. Aspek Tujuan Program

Secara umum aspek Tujuan Program dapat dikatakan sudah efektif pada **sub Ketepatan dalam menentukan tujuan**, dikarenakan melalui Cash Management System (CMS) menjadi solusi layanan perbankan

berbasis internet untuk memudahkan nasabah SKPD melakukan monitoring dan transaksi secara realtime, sub **aspek ketepatan sasaran** dapat dikatakan sudah sesuai dengan sasaran, dikarenakan adanya sejumlah efisiensi yang dapat dilakukan Pemerintah DKI Jakarta karena menerapkan transaksi non tunai di antaranya biaya perawatan kendaraan dinas selain itu juga sudah sesuai SOP dan alur yang ditetapkan.

4. Aspek Pemantauan Program

Aspek Pemantauan Program disimpulkan bahwa pada **sub aspek aspek Ketepatan dalam Melakukan Perintah** dapat dikatakan sudah berjalan dengan melakukan evaluasi sesuai dengan bentuk perhatian kepada pengguna program, hal ini terlihat bahwa perihal Monitoring Proses dan Keberlanjutan Program dan Evaluasi Layanan sudah sesuai dengan SOP. Sedangkan pada **sub aspek Ketepatan berfikir** pelaksana dalam pengguna program dalam hal ini BPBD Provinsi DKI Jakarta setelah dilaksanakan program penggunaan transaksi non tunai dalam Pembayaran Belanja penanggulangan bencana, dari segi evaluasi sudah ada kesesuaian dengan tujuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, saran terkait aspek-aspek penelitian sebagai berikut:

1. Pada aspek ketepatan sasaran program, agar BPKD Provinsi DKI Jakarta membuat *guidance*/panduan yang jelas tentang Penggunaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Penanggulangan Bencana sehingga dapat mempercepat transaksi karena urgensi yang tinggi terkait nyawa manusia.
2. Pada aspek sosialisasi program, agar BPKD Provinsi DKI Jakarta harus berinovasi dan lebih interaktif dalam menyebarkan sosialisasi kepada pengguna transaksi non tunai, seperti membuat animasi dan *tools* simulasi transaksi non tunai sehingga bendahara lebih mudah memahaminya.
3. Untuk aspek tujuan program, meningkatkan kesadaran kepada bendahara BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam penggunaan transaksi non tunai harus mengarahkan kepada skala prioritas dalam memproses transaksi pembayarannya.
4. Pada aspek pemantauan program, dilakukan evaluasi dan monitoring 3 bulan sekali dari BPKD Provinsi DKI Jakarta guna meminimalisir indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah.
5. Belum ada penelitian terkait regulasi yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program penggunaan transaksi non tunai di Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Lubis, D. I., Indrawan, M., & Fachrudin, R. (2014). *Visa Masuk Kota: Alternatif Kebijakan Kaum Urban untuk Mengatasi Kepadatan Penduduk Jakarta*. Retrieved Agustus 31, 2018, from <http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/view/144>
- Agus Salim. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana
- Akhmadi, M. H. (2017). *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 99-114.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 49-57.
- Citradika, D. P., Atahau, A. D., & Satrio, D. (2019). THE USE OF NON-CASH TRANSACTIONS AMONG BATIK SMES: AN EMPIRICAL REVIEW FROM INDONESIA. *International Journal of Business and Society*, 224-231.
- Dami, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Georgopolous, & Tannenbaum. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, T. L. (1998). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Haqi, D. N., & Suseno, D. A. (2019). Role of Support Infrastructure and Information System on Non-Cash Transaction. *Economics Development Analysis Journal*, 224-231.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hari Lubis, S. B., & Huseini, M. (2009). *Pengantar Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 227-236.

- Jakarta Open Data. (2016, Agustus 31). *Data Jumlah Pendatang Baru WNI dari Luar DKI Jakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta*. Retrieved Desember 29, 2020, from <http://data.jakarta.go.id/dataset/jumlah-pendatang-baru-wni-dari-luar-dki-jakarta>
- Lukmanu hakim, M., Djambak, S., & Yusuf, K. (2016). Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Velositas Uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 41-46.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Makmur. (2013). *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maddick, H. (2004). *Desentralisasi Dalam Praktek (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Moshi, H. P. B. (2012). Implications of Cash-Dominated Transactions for Money Laundering. *Working Paper Institute For Seurity Studies*.
- Munji, K. (2011, Mei 24). *Pembangunan daerah, sector, dan nasional*. Retrieved Mei 24, 2016, from <http://www.elearning-rri.net/materipim3/pdsn.ppt>
- Nawawi, Z. (2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nelasari, P. R., & Cahyono, H. (2018). Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 1(3), 251-260.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 220-229.

- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi. (2018). EFEKTIVITAS DAN PERSPEKTIF PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1-18.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2015). *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratnasari, W. (2018). Studi Deskriptif tentang Efektivitas Program Layanan Go Sigap di Kepolisian Resort (Polres) Gresik. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1-12.
- Rukman, M. (2006). *Efektivitas Kerja Karyawan*. Bandung: Budi Mulia.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2018). Industrial Research Workshop and National Seminar. *Industrial Research Workshop and National Seminar* (pp. 1171-1181). Bandung: Polban.
- Siagian, S. P. (1987). *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sobko, O. V. (2014). Fraud in Non-Cash Transactions : Methods , Tendencies and Threats. *World Applied Sciences Journal*, 29(6), 774–778. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.06.13930>
- Sudirwo, D. (1985). *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Sukirno, S. (1976). *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Tjokrowinoto, M. (1987). *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Tjokrowinoto, M. (2007). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Utari, N. P., & Salomo, R. V. (2017). Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan. *Jurnal Skripsi*, 1-18.

Wulandari, B. I. (2019). Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non – Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 2014-2017). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Yuwono, Sony dkk.2007.*Memahami APBD dan Permasalahannya (panduan pengelolaan keuangan daerah)*.Malang: Bayumedia Publishing

PERATURAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Instruksi Gubernur No. 04 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*non cash*)

Instruksi Gubernur No. 151 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*non cash*)

Instruksi Gubernur No. 256 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*non cash*)

Instruksi Gubernur No. 33 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*non cash*)

Dokumen

BPK RI, 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA.2015* .Jakarta

BPK RI, 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA.2016* .Jakarta